



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 11 TAHUN 1990
TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**



BAGIAN HUKUM

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

TAHUN 1991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 1991 SERI D NO.SERI 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 1990

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- mbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah -
yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk me-
ningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara-
an pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap -
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan maka perlu
terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam Wila-
yah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu menga-
tur lebih lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok-
Pemerintahan di Daerah mengenai penunjukan Pegawai-
pegawai Daerah sebagai penyidik terhadap pelanggar-
an atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-
tang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah -
Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Menteri Kehakiman
Nomor M.05 -PW.07.03 Tahun 1984 telah diatur ten-
tang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan
dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- d. bahwa untuk mencapai maksud huruf a,b,c, pada kon-
sideran diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan
kannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan Keamanan Negara Republik Indonesia ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14 -PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Menjabat Penyidik Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984, tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah-Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- d. Penyelidik adalah serangkaian tindak Penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka;

- e. Tindak Pidana : adalah setiap perbuatan atau tindakan dari seorang atau organisasi/badan Hukum yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- f. Penyidik : adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan tugas penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- g. Lembaran Daerah: adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- h. Unit Organisasi: adalah tempat petugas Penyidik - Pegawai Negeri Sipil yang berada di kantor / Dinas, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

B A B II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Unit Organisasi;
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Tugas Penyidik adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang memuat ketentuan Pidana yang berlaku dalam wilayah hukum di tempat penyidikan tersebut ditempatkan.

B A B III

K E W E N A N G A N

Pasal 4

(1) Penyidik mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

B A B IV

PENUNJUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah berwenang menunjuk nama-nama calon Penyidik ;
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah ;
- a. Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK-I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing ;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang teknik operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknik operasional ;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) untuk selama (2) tahun berturut-turut harus terisi dengan rata-rata nilai baik ;
 - d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian penyidik dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

B A B V

PELAKSANAAN TUGAS DAN PEMBINAAN.

Pasal 6

- (1) Penyidik dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik memuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan surat ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemasukan rumah ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya - kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindakan lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi masing-masing - untuk diteruskan kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembinaan Penyidikan dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 9

Baya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan menampakkannya dalam Lembaran Daerah.

Kandungan, 15. Nopember 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,
K e t u a,

cap. dtt.

M.YUSERAN ANWAR, BA

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

cap. dtt.

M. MOH . ARLAN ,SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan,

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan dengan Surat Keputusan
an :

Nomor : 10
Pada tanggal : 1 Oktober 1991
Tahun : 1991
Seri : D
No Seri : 9

Tanggal : 27 Agustus 1991
Nomor : 22/SK-1/KUM.

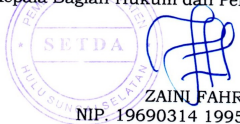
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,

Drs. H. Ideris Apsani.

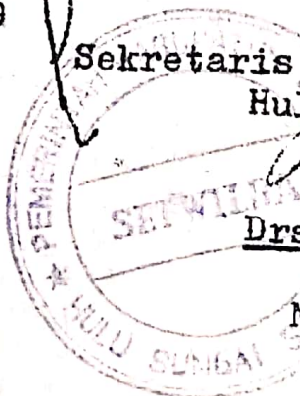
Pembina

NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002



P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NO MOR: 11 TAHUN 1990

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PE -
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan tertib hukum wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya menegakan huku dipandang perlu mengatur tentang ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah Herziene Inlandch Regelemen I ndonesia yang diperbaharui (RIB) akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menyebut bahwa " Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk pegawai-pegawai Daerah yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ".

Adanya penyidik pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat sehingga kesinambungan dan kelancaran kegiatan Pemerintah akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 2
pasal 3

: Cukup jelas.
: Yang berlaku dalam wilayah Hukum adalah Wilayah dimana petugas Penyidik ditempatkan.

Pasal 4 ayat (1) a s/d h : Cukup jelas

a (i)

: Yang dimaksud tindakan lain disini yaitu tindakan yang dianggap perlu oleh penyidik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (2)

: Karena berwenang melakukan tugas penangkapan adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 18 KUHP, dan yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik (Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Penuntut Umum serta hakim Pengadilan sebagaimana Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.

Pasal 5 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian seseorang PNS oleh Menteri Kehakiman disesuaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 s/d 7

6 ayat (2) s/d c
ayat (3)

: Cukup jelas.

: Cukup Jelas.

: Pemasukan rumah yang dimasuk
an disini adalah kegiatan pe
nyidik dalam melaksanakan -
tugasnya memasuki pagar ru -
mah & Perumahan seseorang -
yang diduga melakukan tindak
pidana.

Pasal 8

: Yang dimaksud dengan pembina
an dalam hal ini meliputi pe
ningkatan mutu penyidik me
lalui pendidikan dan latihan.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10

: Cukup jelas.

=====000000000000=====